

Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia

Oleh: Andi Suwirta

Pengantar ¹

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik suatu negara, dunia pendidikan lebih memposisikan dirinya sebagai variabel terikat. Dengan demikian maka keberadaan, kelangsungan dan kemajuan sebuah dunia pendidikan pun akan sangat diwarnai oleh fluktuasi dan dinamika kehidupan politik suatu negara. Untuk kasus Indonesia yang kini masih mengalami gejolak politik, akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang tak kunjung tertangani, maka imbasnya terhadap dunia pendidikan juga cukup terasa. Dengan mencoba menganalisis akar-akar penyebab dari krisis moneter dan gejolak politik serta imbasnya terhadap dunia pendidikan, saya lebih melihat sisi positif dan serba optimistik dari gejala yang diamati. Paling tidak ada dua hikmah yang dapat diambil dari adanya krisis moneter dan gejolak politik itu. *Pertama*, perlunya reformasi secara sistematis dan integral di bidang pendidikan agar lebih sehat, berkualitas, dan siap menyongsong kehidupan di masa depan. *Kedua*, memberi peluang, tantangan, dan jawaban yang lebih besar kepada para pengambil keputusan di dunia pendidikan, mulai dari tingkat nasional sampai lokal, untuk menerjemahkan dan mengaktualisasikan gagasan, visi, manajemen, dan kebijakan kreatifnya kedalam realitas sosial yang sebenarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis moneter yang gejalanya mulai menguat pada bulan Juli 1997 di Indonesia – dan dampaknya masih dirasakan sampai sekarang di segala bidang – membawa implikasi-implikasi politik penting. Krisis itu sebagian telah memicu pula krisis-krisis yang lain, diantaranya adalah kepercayaan kepada pemerintah

¹Tulisan ini, pada mulanya, merupakan makalah yang disajikan dan didiskusikan dalam Forum Pemilihan Dosen Teladan di tingkat FPIPS dan IKIP Bandung pada tahun 1998 dan, kemudian, pernah dimuat di jurnal *Mimbar Pendidikan*, No.4 (Bandung: University Press IKIP Bandung, 1998), hlm.

sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang absyah mulai digugat dan dipertanyakan.

Gugatan yang semula disuarakan oleh mahasiswa dari balik pagar kampus itu, dalam perkembangan selanjutnya, mendapat dukungan dari banyak pihak. Dari sebuah krisis moneter yang tak kunjung tertangani oleh pemerintah dan tuntutan mahasiswa yang disokong oleh kelompok-kelompok kepentingan lainnya dalam masyarakat itu, akhirnya membawa pada sebuah gejolak politik yang serius. Gejolak politik itu ditandai oleh adanya kerusuhan dan penjarahan sosial di satu sisi, dan turunnya Soeharto, Presiden RI kedua, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun di sisi lain. Krisis moneter dan gejolak politik itu pada gilirannya membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dengan sistem dan struktur kehidupan yang selama ini dibangun. Dan untuk menyehatkan kembali sistem dan struktur kehidupan yang sudah rapuh itu perlu diadakan reformasi di segala bidang, tidak terkecuali dengan bidang pendidikan.

Tulisan ini, dengan demikian, ingin mengkaji tentang krisis moneter di satu sisi dan gejolak politik di sisi lain, serta konsekuensinya pada adanya keharusan pembaharuan dan perbaikan di bidang pendidikan. Dengan demikian secara garis besar tulisan ini akan mengkaji tiga hal. *Pertama*, mengkaji secara selintas akar-akar dari penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1990-an dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. *Kedua*, mengkaji pola-pola sejarah yang cenderung berulang bahwa krisis ekonomi yang tak tertangani membawa gejolak politik yang serius. Dan *ketiga*, mengkaji konsekuensi dari krisis ekonomi dan gejolak politik itu pada perlunya reformasi di bidang pendidikan. Pada bagian akhir akan diambil kesimpulan dan beberapa saran, termasuk perlunya reformasi pendidikan, baik di tingkat local maupun nasional. Hal terakhir ini penting untuk melihat bagaimana dinamika dan gejolak politik di tingkat nasional itu daya resonansinya dirasakan juga pada konteks lokal.

Pembangunan Ekonomi dan Krisis Moneter di Indonesia

Sejak awal kelahirannya pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru bertekad untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai paradigma utamanya (Anne Booth dan Peter Mc Cawley ed., 1985:1-65). Pembangunan ekonomi, dengan titik tekan pada pertumbuhan ekonomi itu, memerlukan stabilitas nasional di satu sisi, dan masuknya modal asing di sisi lain. Dengan dibukanya penanaman

modal asing pada tahun 1967 dan didayagunakannya para teknokrat ekonomi, terutama dari Universitas Indonesia Jakarta, sebagai SPRI (Staf Pribadi) Presiden Soeharto, maka dimulailah apa yang disebut dengan Trilogi Pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan stabilitas nasional (Mochtar Mas'ood, 1989:197-217; Richard Robison, 1991:132-76).

Paling tidak ada dua kerangka teoritis yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonominya dengan baik. *Pertama*, kerangka teoritis yang dikemukakan oleh W.W. Rostow, ahli ekonomi dari Amerika Serikat, dalam bukunya *The Stages of Economic Growth*. Kerangka teoritis yang sebenarnya untuk meng-*counter* paradigma pembangunan bercorak komunistis atau sosialis itu sedang populer pada masyarakat akademik Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Dengan kerangka ini dikemukakan tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yang semakin maju dan berkelanjutan. Pembangunan dengan titik tekan pada pertumbuhan ekonomi ini pada awalnya memang hanya menguntungkan sekelompok kecil elite sosial saja yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, demikian diyakini oleh penganut teori Rostow, akan terjadi apa yang disebut dengan proses "*trickle down effect*" atau tetesan-tetes kemakmuran ke bawah. Dengan perkataan lain elite sosial yang diuntungkan itu akan membagikan secara sukarela, dan dengan sendirinya, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosialnya kepada anggota masyarakat umumnya. Kerangka teoritis yang menjanjikan itu ternyata tidak terbukti dalam dataran dan realitas sosial. Selama tiga puluh tahun pembangunan ekonomi itu berlangsung maka tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial tetap tinggi di Indonesia (M. Dawam Rahardjo, 1987:121; Sjahrir, 1986:6-33).

Kedua, kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Daniel Bell, ilmuwan sosial dari Amerika Serikat juga, dalam bukunya *The End of Ideology*. Pemikiran yang populer di Amerika Serikat pada tahun 1960-an ini juga berasumsi bahwa sudah waktunya masyarakat yang modern itu untuk berpikir rasional dan kritis, tidak lagi mesti dikonstruksi oleh sekat-sekat sudut pandang yang serba ideologis dan politis (Daniel Bell, 1960:191-207). Dengan perkataan lain masyarakat yang semakin modern dan rasional sesungguhnya lebih menuntun paradigma pemikiran yang lebih bernuansa dari pada yang lebih bersifat hitam-putih. Kerangka pemikiran seperti ini ketika diterapkan oleh elite penguasa dan militer di Indonesia telah melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan proses depolitisasi

dan penyederhaan partai-partai politik dengan segala implikasinya itu.

Paradigma pembangunan dengan titik tekan pada pertumbuhan ekonomi di satu sisi, serta perlunya depolitisasi dan deideologisasi di sisi lain itu pada kenyataannya tetap juga menuntut perlunya elite sosial yang siap dijadikan katalisator bagi proses modernisasi. Dalam hal ini pemerintah Orde Baru dihadapkan pada pilihan yang sulit mengingat minimnya kelas menengah Indonesia yang secara mental, keterampilan, dan modal siap menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi itu. Realitas sosial dan warisan sejarah sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan zaman negara-nasional Indonesia nampaknya telah menjadikan kelompok sosial Cina lebih unggul bila dibandingkan dengan kelompok sosial pribumi. Betapapun pada tahun 1950-an pemerintah RI telah mengambil kebijakan ekonomi dengan menerapkan “Program Benteng”, suatu kebijakan dengan maksud untuk melindungi dan memajukan kelas menengah ekonomi pribumi agar bisa bersaing dengan golongan Cina, namun dalam kenyataannya program itu tidak sepenuhnya berhasil (Yahya A. Muhaimin, 1991:17-67). Karena itu tidak ada pilihan lain bagi elite politik dan militer Orde Baru untuk menjadikan golongan Cina dan golongan birokrat, terutama anak-anak dan kerabat pejabat, untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Merekalah yang kemudian muncul secara cepat menjadi kelompok sosial yang sangat diuntungkan sebagai pengusaha, konglomerat, dan elite sosial dengan hak-hak istimewa yang luar biasa (Richard Robison, 1990:136-55; Yoshihara Kunio, 1990:51-92).

Dengan munculnya para pengusaha dan konglomerat besar yang diproteksi dan disubsidi oleh pemerintah Orde Baru selama tiga puluh tahun itu memang telah mencapai tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 7-10% pertahun. Namun tetap saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak membawa kemakmuran yang merata dan adil bagi semua masyarakat Indonesia. Kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang dan elite sosial tertentu, terutama kelompok Cina, golongan birokrat, anak-anak, dan kerabat pejabat lainnya. Dengan demikian maka proses “*trickle down effect*” yang dijanjikan dalam paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru itu tidak menjadi kenyataan. Yang ada adalah kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan nasional. Gejala-gejala sosial dari kesenjangan itu dapat dirasakan dalam bentuk kemiskinan massal, pengangguran kolektif, dan pemukiman yang kumuh di kota-kota besar di Indonesia (Sri-Bintang Pamungkas, 1996; Thee Kian Wie, 1983).

Kesenjangan sosial yang lebar itu pada gilirannya membawa berbagai kecemburuan sosial yang tidak sehat. Kecemburuan, ketidakpuasan, dan protes sosial itu semakin menggumpal dalam dunia bawah sadar masyarakat ketika melihat, dalam waktu yang bersamaan, perilaku dan sikap hidup para pengusaha dan penguasa yang juga tidak sehat. Gaya hidup mewah, pamer kekayaan dan kekuasaan, serta perilaku tidak terpuji lainnya membawa pada satu kesadaran bahwa pembangunan nasional ini lebih memihak kepada mereka yang “berada” daripada kepada mereka yang tidak “berdaya”. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa berbagai perusahaan dan kekuasaan yang mereka miliki itu nampaknya tidak dikelola secara profesional dan transparan. Praktek proteksi dan subsidi hanya menimbulkan ketergantungan dan sikap manja pengusaha kepada penguasa. Ditambah lagi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat dalam dunia usaha dan pemerintahan kita menjadikan keadaan ekonomi semakin mengalami in-efisiensi (Mochtar Mas’oed, 1994:167-78; David Jenkins, 1984:13-52).

Krisis Moneter dan Gejolak Politik di Indonesia

Gejala akan adanya krisis moneter yang gawat mulai nampak pada bulan Juli 1997. Menguatnya dollar terhadap mata uang rupiah telah menjadikan hutang-hutang swasta membengkak pembayarannya ketika sudah jatuh tempo. Krisis moneter yang semula hanya terbatas pada kalangan menengah ke atas ini dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat bawah, terutama dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok mengingat persediaan dan distribusi yang timpang (*Kompas; Pikiran Rakyat*, 1998:April-Mei). Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, masyarakat mengalami kekalutan yang luar biasa dengan memborong barang apa saja yang bisa dibeli untuk persediaan kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif sejarah Indonesia maka masa-masa kekalutan sosial dan politik akibat krisis moneter ini hanya dapat dibandingkan dengan periode 1944-1946, masa akhir pendudukan Jepang dan masa awal revolusi Indonesia, dan periode 1964-1966, masa peralihan kekuasaan dari regim Orde Lama ke Orde Baru. Ciri-ciri yang menonjol dari fenomena sejarah seperti itu adalah: masyarakat dilanda oleh ketidakpastian, rumor dan desas-desusu menyebar, tingkat inflasi tinggi, disana-sini masyarakat antri beras, antri minyak, dan antri kebutuhan pokok lainnya (Benedict R.O’G. Andreson, 1988).

Kekalutan sosial itu dalam derajat tertentu bisa ditolerir kalau saja pemerintah arif menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi. Dalam suasana krisis yang sudah melanda hampir semua lapisan masyarakat

itu, pada awal bulan Mei 1998 pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) (*Media Indonesia; Pikiran Rakyat*, 1998:4 Mei). Tidak pelak lagi kenaikan ini diikuti oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Di sinilah sumber dari krisis politik dan krisis kepercayaan kepada pemerintah bermula. Mahasiswa mulai hilang kesabarannya. Dengan mengulang peran-peran yang telah dimainkan oleh para mahasiswa sebelumnya – seperti gerakan mahasiswa tahun 1966, 1974, dan 1978 (Sulastomo, 1990; Yozar Anwar, 1982) – mahasiswa yang mengklaim dirinya sebagai “Angkatan 1998” itu mulai berdemonstrasi dengan turun ke jalan-jalan. Tuntutan yang semula sederhana saja yaitu “turunkan harga” kemudian memiliki arti konotatif yang semakin luas. Kata “**harga**” berarti juga “Soe-**HAR**-to dan keluar-**GA**”. Jika sudah demikian maka gerakan-gerakan mahasiswa dengan motif dan tujuan yang kompleks berkembang menjadi sebuah gerakan reformasi total.

Protes-protes sosial yang digerakkan oleh mahasiswa itu, dan didukung oleh kekuatan masyarakat lainnya, sesungguhnya merupakan akibat yang wajar dari rekayasa pembangunan politik Orde Baru selama tiga puluh tahun. Sebagaimana telah disinggung di muka, para elite politik dan militer Orde Baru menjadikan kerangka pemikiran “*the end of ideology*” sebagai basis utama rekayasa politiknya. Depolitisasi kampus-kampus melalui kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1970-an dibawah kepemimpinan Mendikbud Daed Joesoef atau kebijakan Wawasan Almamater tahun 1980-an di bawah pimpinan Mendikbud Nugroho Notosusanto, sesungguhnya hanya berhasil mengerem ketidakpuasan politik mahasiswa yang bersifat sementara. Begitu juga penyederhanaan kekuatan sosial-politik dari 10 partai politik pada tahun 1971 menjadi 3 partai politik pada tahun 1973 hanya memendam ketidakpuasan elite politik yang tidak terakomodir oleh rekayasa politik pemerintah. Kebijakan “*floating mass*” atau massa mengambang pada tahun 1970-an juga hanya berhasil secara sementara meredam kekuatan dan aspirasi politik yang dimiliki masyarakat (Ali Moertopo, 1974; Syamsuddin Harris, 1992).

Maka ketika katup-katup pengaman yang bersifat sementara itu kini rapuh, tidak pelak lagi, gelombang tuntutan reformasi total mengalir laksana air bah yang dahsyat. Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Tuntutan mereka juga berkembang dan meluas, tidak hanya menginginkan turunnya Soeharto, tetapi menuntut dihilangkannya penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam

pemerintahan. Sementara itu kekuatan-kekuatan politik lain yang mendukung gerakan reformasi mahasiswa menuntut juga agar diadakan revisi terhadap undang-undang tentang: pemilu, susunan dan kedudukan DPR/MPR, partai politik, subversi, dan sebagainya. Cara dan gaya tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa itu beraneka ragam. Ada yang turun ke jalan dan aksi “*long march*” menuju ke dewan perwakilan daerah. Ada juga yang aksi duduk di kampus dengan mendengarkan seorang agitator yang bersemangat. Namun semuanya tetap dilakukan dengan cara-cara yang khas mahasiswa, yaitu kreatif, menarik, sarat dengan sinisme dan kritik sosial.

Salah satu gugatan mahasiswa terhadap mekanisme Pemilu (Pemilihan Umum) yang tidak LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), dapat dilihat dari lagu “*Pemilihan Umum*” yang dirubah syairnya menjadi “*Penipuan Umum*”. Lagu yang acapkali dikumandangkan saat-saat menjelang pesta demokrasi rakyat itu, dirubah syairnya secara kreatif dan sarkastis oleh mahasiswa 1998 sebagai berikut:

*Penipuan Umum telah memanggil kita
S'luruh rakyat dipaksa gembira
Hak demokrasi pura-pura
Tanda kita belum merdeka.*

*Pilihlah GOLKAR yang tak dapat dipercaya
Pengemban Soeharto yang setia
Dibawah paket Lima Undang-undang Setan
Kita menuju ke Penipuan Umum (Suwirta, 1998).*

Sedangkan kritikan terhadap eksistensi DPR/MPR yang mandul dan tidak berdaya menghadapi dominasi kekuasaan pemerintah, mahasiswa mengubah lagu “*Balonku Ada Lima*” menjadi “*Fraksiku Ada Lima*”. Lagu yang biasanya dibawakan oleh anak-anak Balita (di bawah lima tahun) itu digubah secara kreatif dan, lagi-lagi, sarkastis oleh mahasiswa 1998 sebagai berikut:

*Soeharto punya fraksi
Fraksinya ada lima
Hijau, kuning, dan merah
Loreng, utusan daerah.*

*Yang kuning paling parah (dor!)
Yang loreng sama saja
Fraksinya tinggal tiga
Gila-gila semua (Suwirta, 1998).*

Dan ketidaksenangan terhadap Presiden Soeharto dan keluarganya, dilampiaskan oleh para mahasiswa 1998 yang sedang marah itu dengan menyanyikan bait terakhir dari lagu “*Menanam Jagung di Kebun Kita*” yang digubahnya menjadi: “*Gantung, gantung, gantung Soeharto! Gantung Soeharto sekeluarga!*”. Semua aksi yang massal dan kreatif itu dilakukan hampir setiap hari pada awal bulan Mei sampai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dan bila dikaji dari perspektif sejarah, proses jatuhnya Soeharto dalam bulan-bulanan kritikan dan hujatan mahasiswa 1998 itu mirip dengan jatuhnya Soekarno, Presiden I RI, tiga puluh tahun yang lalu dimana mahasiswa juga menyanyikan lagu-lagu yang dikenal umum dan mengubah serta memplesetkannya secara kreatif. Sebagaimana dicatat oleh Soe Hok Gie, seorang aktivis mahasiswa UI di Jakarta pada tahun 1960-an, para mahasiswa 1966 juga menyerang wibawa menteri-menterinya Soekarno itu dengan menyanyikan lagu “*Tek kotek kotek kotek*” menjadi: “*Blog goblog goblog goblok! Kita ganyang menteri goblok! Win kawin kawin kawin! Ada menteri tukang kawin!*” (Soe Hok Gie, 1985).

Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1998 itu ditangani oleh aparat keamanan dengan sikap dan cara yang berbeda-beda. Pada masa-masa awal aksi demonstrasi mahasiswa acapkali bentrok dengan aparat keamanan. Banyak korban yang dialami oleh mahasiswa dan aparat keamanan seperti nampak dalam kasus demonstrasi di Medan, Padang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang. Namun kasus demonstrasi yang dianggap serius adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta (*Kompas; Pikiran Rakyat*, 1998:13 Mei). Dalam aksi demonstrasi itu tidak hanya ditandai dengan adanya bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, tetapi juga telah terjadi aksi penembakan yang menyebabkan 6 orang mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagaimana layaknya sebuah bensin, maka kasus aksi demonstrasi di Universitas Trisakti itu telah menyulut api kemarahan mahasiswa di kota-kota penting lainnya di Jawa. Bahkan di Jakarta sendiri pada keesokan harinya, terjadi aksi kerusuhan dan penjarahan sosial dalam bentuk vandalisme yang sulit dikendalikan oleh aparat keamanan sekalipun (*Kompas; Republika; Media Indonesia; Pikiran Rakyat*, 1998:15 Mei).

Dalam konteks budaya politik di Indonesia, khususnya Jawa, adanya kerusuhan sosial, bencana alam, dan gejala dis-harmonisitas sosial lainnya itu menunjukkan bahwa aura dan wibawa kekuasaan

yang ada sedang surut. Realitas kekuasaan yang semula tunggal dan memusat pada seseorang itu kini sedang mencair dan terpecah-pecah sehingga menimbulkan keadaan disintegrasi dan dislokasi sosial (Benedict R.O'G. Anderson, 1991:44-127; G. Moedjanto, 1990:108-37). Dalam waktu yang relatif singkat kita menyaksikan kekuasaan pusat yang dibangun oleh Soeharto selama 30 tahun sedang mengalami keruntuhan. Sementara itu di masyarakat kita juga melihat kekuatan-kekuatan politik yang sedang bersaing, bergumul, dan bahkan berkonflik untuk mewujudkan tujuan, cita-cita, dan kepentingan politik yang dianutnya. Semuanya sadar bahwa dalam suasana gejolak politik seperti itu segala sesuatu yang semula tabu dan mustahil sangat boleh jadi akan menjadi kenyataan. Yang jelas kita sekarang sedang menyaksikan suatu keadaan dimana "hujan harapan" dan "banjir tuntutan" sedang melanda jagat perpolitikan Indonesia.

Gejolak Politik dan Imbasnya Terhadap Dunia Pendidikan

Adakah imbas dari gejolak politik itu terhadap dunia pendidikan? Sebagai sub-ordinat dari struktur kehidupan politik suatu negara maka dunia pendidikan pun, tidak terkecuali, terkena dampaknya. Salah satu dampak nyata dari gejolak politik yang terwujud dalam bentuk keresahan dan penjarahan sosial itu ialah diliburkannya kegiatan belajar-mengajar di sekolah, terutama di Jakarta dan di kota-kota penting lainnya. Aksi-aksi kerusuhan sosial itu juga telah mematikan kelancaran lalu lintas dan fasilitas lainnya sehingga membawa dampak juga terhadap kelangsungan proses pendidikan. Tuntutan reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan berhasil menurunkan Presiden Soeharto itu, pada gilirannya juga berhasil mendemisionerkan kabinet pembangunan yang ada, termasuk mundurnya Wiranto Arismunandar, seorang mantan Rektor ITB yang dinilai oleh mahasiswa tidak demokratis sikapnya, sebagai Mendikbud tersingkat di negeri ini.

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa itu menuntut diadakannya pembaharuan dan perbaikan di segala bidang. Wacana yang paling dominan dewasa ini adalah tuntutan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Namun laksana efek bola salju yang sedang menggelinding, tuntutan reformasi itu kini merambah di segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dengan bidang pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan itu dinilai strategis dan penting sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa potensi dan dasar

dinamika sebuah negara itu, terutama yang menyangkut sumber daya manusia, berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Masalahnya sekarang adalah bidang-bidang pendidikan apa saja yang secara mendesak perlu segera direformasi, tidak semua praktisi dan akademisi pendidikan memiliki visi yang sama.

Namun paling tiga ada tiga hal yang dinilai mendasar dan mendesak untuk melakukan reformasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Fakry Gaffar, Rektor IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia) pada saat-saat gencarnya gerakan reformasi digulirkan oleh mahasiswa pada tahun 1998, ketiga hal itu adalah:

Pertama, reformasi di bidang perangkat perundang-undangan pendidikan. Sejalan dengan semangat reformasi yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi, desentralisasi kekuasaan, dan dinamika arus bawah, maka segala macam perundangan dan peraturan di bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan semangat itu harus direvisi dan atau diganti.

Kedua, reformasi di bidang manajemen dan organisasi pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai dengan lokal. Manajemen yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber potensial pendidikan lainnya itu perlu dikaji ulang secara profesional dan transparan agar tidak terjadi praktek-praktek inefisiensi. Sedangkan organisasi pendidikan juga perlu direstrukturisasi agar otoritas pengelolaan pendidikan menjadi jelas dan respon kelembagaan terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat juga semakin luwes dan cepat.

Ketiga, reformasi di bidang etika dan nilai dasar pendidikan, terutama di bidang agama, agar struktur mental yang mendasari perilaku manusia itu tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif, seperti nampak dengan semakin dominannya fenomena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Mohammad Fakry Gaffar, 1998a).

Gambaran tentang reformasi di tingkat makro-nasional itu akan semakin jelas apabila kita bandingkan pula dengan dinamika di tingkat mikro-lokal, khususnya di lingkungan pendidikan IKIP Bandung. Berdasarkan pengamatan saya bahwa sejak maraknya aksi demonstrasi mahasiswa IKIP Bandung pada awal bulan Mei 1998, jelas kelangsungan proses perkuliahan di kelas cukup terganggu. Saat-saat demonstrasi, yang acapkali berbarengan dengan waktu kuliah, mahasiswa pada umumnya meminta izin kepada dosennya untuk ikut dalam aksi-aksi reformasi ala mahasiswa itu. Pada sebagian dosen keadaan ini cukup dilematis. Tidak diizinkan akan mendapat tuduhan sebagai dosen yang konservatif dan tidak tanggap terhadap tuntutan

zaman. Apabila diizinkan maka ia harus mengorbankan program perkuliahan yang telah diagendakan dan dipersiapkan secara baik. Namun ketika pimpinan IKIP Bandung secara tegas menyatakan dukungannya terhadap tuntutan reformasi yang dikemukakan oleh mahasiswa, maka pada umumnya dosen juga turut mendukung aksi-aksi demonstrasi mahasiswa itu (Mohammad Fakry Gaffar, 1998b).

Adalah cukup menarik mencermati bentuk dukungan yang diberikan dosen kepada mahasiswanya itu. Sebagian ada yang hanya hadir di tengah-tengah aksi demonstrasi untuk turut memberikan semangat dan restu kepada mahasiswa. Sebagian yang lain turut menjadi agitator yang bersemangat untuk memberi isi dan wawasan politik bagi mahasiswa. Ada juga yang turut menyertai mahasiswa turun ke jalan dan menuju ke gedung DPRD Jawa Barat di lapangan Gasibu Bandung demi keamanan dan ketertiban jalannya aksi mahasiswa. Namun apapun bentuk dukungan yang diberikan dosen kepada mahasiswanya itu satu hal yang pasti adalah bahwa seluruh civitas akademika IKIP Bandung pun menghendaki reformasi, termasuk di bidang pendidikan, yang lebih menyeluruh, sistematis, dan pasti. Ada baiknya juga, barangkali, agar tiga agenda utama reformasi pendidikan di tingkat nasional itu diaktualisasikan dalam tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lembaga yang bersangkutan.

Penutup

Dari penjelasan di atas kiranya dapat dikemukakan kembali tiga kesimpulan pokok. *Pertama*, krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1990-an ini, bila dikaji dalam perspektif historis, merupakan konsekuensi logis saja dari strategi kebijakan pemerintah Orde Baru yang keliru dengan segala dimensinya. Pembangunan ekonomi selama tiga puluh tahun ternyata tidak dapat mengatasi kesenjangan sosial yang semakin lebar antara golongan kaya dengan golongan miskin. Sumber-sumber kerawanan sosial akibat kesenjangan ekonomi itu semakin lama semakin tarakumulasikan dalam bentuk protes-protes sosial yang potensial destruktif. Dan ketika landasan perekonomian nasional semakin rapuh yang ditandai dengan nilai rupiah melemah, hutang-hutang swasta menumpuk, dan harga-harga kebutuhan pokok meningkat, maka krisis moneter itu menjadi keniscayaan yang sulit dicari pemecahannya.

Kedua, krisis moneter itu pada gilirannya berpengaruh terhadap dinamika kehidupan politik suatu negara. Sudah menjadi kenyataan sejarah pula bahwa gejolak politik dan kekalutan sosial di Indonesia

itu acapkali dipicu oleh adanya krisis ekonomi. Akibat gagal menangani krisis ekonomilah yang menyebabkan Soekarno pada tahun 1968 harus melepaskan jabatannya sebagai presiden RI yang pertama. Dan kini sejarah itu berulang. Akibat gagal pula mengatasi krisis ekonomi, yang berimbas pada gejolak politik dan kekalutan sosial, pada tahun 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintah yang kuat memang harus mampu menangani berbagai krisis yang ada di masyarakat. Sebab kalau tidak maka pemerintahan itu tidak mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat.

Ketiga, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik suatu negara maka dunia pendidikan lebih memposisikan dirinya sebagai variabel terikat. Dengan demikian maka gejolak politik dan kekalutan sosial, akibat krisis moneter itu, ada juga dampaknya bagi kelangsungan dan kelancaran dunia pendidikan. Namun dampak itu bisa dilihat dari sudut pandang yang bernuansa. Krisis moneter dan gejolak politik itu telah membawa kesadaran baru tentang perlunya reformasi di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Semangat reformasi yang ditandai oleh nilai-nilai demokrasi, desentralisasi kekuasaan, dan kreativitas masyarakat itu menuntut pula, terutama di bidang pendidikan, perangkat perundang-undangan, manajemen organisasi, dan konstruksi dasar etika pendidikan yang lebih luwes, dinamis, profesional, dan ajeg.

Belajar dari pengalaman krisis moneter, gejolak politik, dan keharusan reformasi di bidang pendidikan itu, maka beberapa pelajaran berharga dapat dikemukakan. Sudah waktunya agar semua kekuatan potensi bangsa bertindak lebih arif, profesional, dan bersemangat dengan tingkat integritas diri yang teruji. Praktek-praktek usaha di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan yang menimbulkan in-efisiensi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Sedangkan perilaku politik dan cara-cara mendidik yang otoriter, tidak demokratis dan egaliter, serta tidak mengakomodasi potensi kreativitas masyarakat, juga sudah harus dibuang jauh-jauh agar keberadaan, kesinambungan, dan kemajuan bangsa ini tetap terjaga. Khusus mengenai dunia pendidikan, sudah seharusnya ditangani oleh mereka yang profesional, memiliki wawasan integral, dan kecintaan yang mendalam terhadap dunia pendidikan. Tanpa itu maka dunia pendidikan kita akan tetap centang perentang dan tambal sulam.

Daftar Pustaka